

## KAPITALISME DAN PENDIDIKAN LIBERAL

**Marjuni**

Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

UIN Alauddin Makassar

Alamat: Kota Makassar

### Abstrak

*Kapitalisme muncul sebagai antitesa terhadap sekularisme dan materialisme, yang telah menjadi ideologi masyarakat Barat pada saat itu. Sekularisme dan materialisme sendiri lahir dari emperisme dan individualisme. Sekularisme dan materialisme inilah menyebabkan tingginya produktifitas barang-barang dan kemewahan duniawi, lalu kemudian melahirkan mentalitas abad industri yang manipulatif. Kebiasaan dan aktivitas baru itu mengakibatkan terciptanya institusi sosial dan politik baru dan membangkitkan pengajaran akademik baru yang membuat teori tentang seperangkat aktivitas ekonomi khusus, produksi, pertukaran, distribusi, peminjaman uang yang tiba-tiba muncul menonjol dalam relief yang tajam. Inilah yang mengakibatkan lahirnya kapitalisme.*

### Kata Kunci

*Kapitalisme – Pendidikan – Liberal*

### I. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk berbudaya. Kebudayaan yang telah dilahirkan oleh manusia, sangat mempengaruhi karakter dan sepaik terjang manusia, baik secara individu maupun kolektif.

Menurut Meville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski sebagaimana dikutip oleh Soeharjono Soekanto, bahwa kebudayaan (*cultural deteminism*) adalah segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Kebudayaan merupakan sesuatu yang bersifat *super-organic*, karena kebudayaan yang berturun-temurun dari generasi ke generasi tetap hidup terus, walaupun orang-orang yang menjadi anggota masyarakat senantiasa silih-berganti disebabkan karena kematian dan kelahiran.<sup>1</sup>

Sejak lahir manusia sudah mempunyai naluri untuk hidup berkawan, sehingga manusia disebut *social animal*. Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai naluri yang disebut *gregariousness*. Pada hubungan antara manusia dengan sesamanya, tampaknya yang paling penting adalah reaksi yang timbul akibat adanya interaksi. Reaksi-reaksi itu mengakibatkan bertambah luasnya sikap dan tindakan seseorang. Misalnya, apabila seseorang menyanyi, maka ia memerlukan reaksi yang mungkin bersifat positif (pujian) ataukah bersifat negatif (celaan), reaksi itulah yang mendorong seseorang untuk memperbaiki dan semakin menyempurnakan tindakannya

(nyanyiannya) pada masa-masa yang akan datang. Hal ini disebabkan karena manusia mempunyai dua hasrat dalam dirinya, yaitu:

- a. Keinginan untuk menjadi satu dengan sesamanya atau manusia lain yang ada di sekelilingnya.
- b. Keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan alam sekelilingnya.

Untuk dapat menghadapi dan menyesuaikan diri dengan kedua lingkungan tersebut, yakni lingkungan sosial dan lingkungan alam, manusia mempergunakan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, selain itu manusia juga berusaha keras menyeraskan diri dengan kedua lingkungannya tersebut untuk merefleksikan diri sebagai salah satu bagian dari masyarakatnya.<sup>2</sup>

Dalam pandangan Islam, budaya biasa disebut *tsaqafat, hadarat dan madaniyah* (peradaban). Budaya atau peradaban dalam Islam mengandung dua makna yaitu ; *Pertama*, lawan kata dari primitif dan buas. Peradaban merupakan fase tertinggi dari fase-fase perkembangan manusia. *Kedua*, sekumpulan keistimewaan masyarakat, keagamaan, moralitas, teknik, keilmuan, seni, yang terbesar dalam masyarakat tertentu, seperti peradaban india, Yunani, dan Arab. Budaya biasa juga diartikan sebagai sejumlah fenomena kemajuan ilmu pengetahuan, seni, moralitas yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam suatu kelompok masyarakat yang memiliki kemiripan. Budaya itu beraneka ragam yang dapat dikelompokkan dalam beberapa istilah yaitu; budaya kuno, budaya modern, budaya Barat, Budaya Timur.<sup>3</sup>

Salah satu budaya yang lahir dari masyarakat Barat pada akhir abad pertengahan yang masih sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat modern dewasa ini adalah paham kapitalis, atau yang lebih akrab disebut kapitalisme. Kapitalisme muncul pada abad keenam belas dan ketujuh belas. Perkembangan mentalitas kapitalis menurut Max Weber, sebagaimana dikutip oleh Pritjof Capra, adalah terkait erat dengan konsep panggilan dalam agama yang muncul untuk merefleksikan akan kesadaran terhadap adanya kewajiban moral untuk memenuhi tugas seseorang dalam kehidupan duniawi. Konsep panggilan duniawi ini mengungkapkan perilaku religius ke dalam dunia sekuler. Konsep tersebut bahkan ditekankan lebih kuat oleh sekte-sekte Puritan, yang memandang aktivitas duniawi dan imbalan material yang berasal dari perilaku rajin sebagai sebagai suatu tanda takdir Ilahi. Dengan demikian, muncullah etos kerja protestan yang terkenal itu, di mana kerja keras mengingkari diri sendiri dan keberhasilan duniawi disamakan dengan kebajikan. Sebaliknya orang-orang Puritan membenci semuanya itu kecuali konsumsi yang paling hemat, dan akibatnya pengumpulan kekayaan bisa diterima selama digabung dengan kerja rajin.<sup>4</sup>

Kapitalisme, sebagai sebuah budaya sekaligus sebagai ideologi masyarakat Barat, mulai sejak lahirnya sampai saat sekarang ini telah memberi pengaruh yang cukup besar terhadap segala segi kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal ini segi pendidikan. Sistem pendidikan yang diamanatkan oleh kapitalisme adalah pendidikan liberal kapitalistik yang bersifat sekuler dan mengandalkan kekuatan rasio semata.

Kemajuan ilmu pengetahuan modern, menurut paham kaum liberalis sekuler, adalah dilatarbelakangi oleh kekuatan metodologi dan eksperimen, sejarah merupakan

hal yang urgen untuk dipelajari, tetapi keseluruhan proses dalam bidang ilmu pengetahuan dilepaskan dari nilai-nilai transendensi Tuhan.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian di atas, yang menarik untuk dikaji lebih jauh adalah Bagaimana wujud dari pada kapitalisme itu?, an bagaimana sistem pendidikan liberal kapitalistik?

## II. Kapitalisme dan Perkembangannya

Kapitalisme tampil sebagai kelompok sosial-ekonomi yang bersandarkan kepada ajaran agama Katolik untuk melawan dan menetralsir paham sekularisme dan materialisme yang cenderung melepaskan diri dari ikatan agama. Dalam praktek etos kerja dan pemenuhan kebutuhan duniawi menurut paham kapitalisme dianggap sebagai bagian dari pengabdian terhadap Tuhan, bahkan dalam pandangannya, aktivitas duniawi dan imbalan dari aktivitas tersebut merupakan “takdir Ilahi”. Menurut teori Weber, nilai-nilai dan alasan religius ini memberi dorongan dan energi emosional bagi kaum materialisme, dan faktor ini sangat penting bagi kemunculan dan perkembangan pesat kapitalisme.<sup>6</sup>

Walaupun kapitalisme pada akhirnya merasuk ke dalam berbagai sendi kemasyarakatan seperti; pendidikan, hukum, industri, seni, dan politik, tetapi ia tidak dapat dilepaskan dari perhitungan rasional kapital ekonomi. Perhitungan rasional ekonomi tersebut meliputi; *Pertama*, pemilikan semua sarana fisik untuk produksi, tanah, bahan-bahan mentah, mesin, peralatan dan seterusnya usaha industri swasta otonom merupakan hak milik yang dapat dijual oleh pemilikinya, hanyalah ketentaraan yang tidak dapat dimiliki secara perorangan. *Kedua*, akuntansi melibatkan kebebasan pasar, yaitu tidak ada pembatasan-pembatasan irrasional atas perdagangan, pembatasan-pembatasan seperti itu mungkin menyangkut halangan-halangan status, bila suatu cara hidup atau konsumsi tertentu ditetapkan bagi satu kelas sosial, seperti ketika warga kota tidak diijinkan memiliki suatu pertanahan atau seorang ksatria atau petani tidak diijinkan melakukan suatu pekerjaan yang berbeda. Dalam situasi seperti itu tidak ada pasar pekerja bebas atau pasar komoditas bebas. *Ketiga*, akuntansi kapitalistik membutuhkan teknologi rasional. *Keempat*, adalah menyangkut hukum yang dapat diperhitungkan. Organisasi industri kapitalistik harus didasarkan pada peradilan dan administrasi yang dapat diperhitungkan. *Kelima*, adalah pekerja bebas. Pekerjaan untuk rakyat harus tersedia, baik bagi pekerja yang legal maupun pekerja yang menjual jasa tenaganya karena dipaksa oleh kemiskinan misalnya. Dan *keenam*, adalah adanya komersialisasi kehidupan ekonomi, yang dimaksud adalah penggunaan secara umum sarana-sarana komersial yang berbentuk hak-hak saham dalam suatu perusahaan.<sup>7</sup>

Pada akhirnya, sistem kapitalisme ala puritanisme menyerah juga, yaitu kapitalisme yang mengedepankan nilai-nilai agama dalam beretoskerja dan mencari kesejahteraan duniawi, kemudian berubah menjadi sekuler. Dan yang sangat berjasa dalam perubahan ini adalah Max Weber, konsep kapitalis ala Max Weber inilah yang menjadi besar hingga sekarang ini, di Eropa khususnya.

Dalam pandangan Weber, kapitalisme dapat dibagi dua yaitu; kapitalisme rasional dan kapitalisme irrasional. Kapitalisme rasional adalah kapitalisme yang mengembangkan metode-metode dan kuantitas produksi, kapitalisme bentuk pertama ini memproduksi materi atau kekayaan. Sementara kapitalisme irrasional adalah bentuk kapitalisme politik, yang dianggap mendukung kekayaan materi yang sudah ada, dan bukannya ditanam sebagai usaha untuk menghasilkan peningkatan kekayaan.<sup>8</sup>

Dalam penetrasinya di dunia Barat, kapitalisme bukannya berjalan mulus tanpa tantangan, tapi ia dikritisi oleh ekonom ternama sejak awal perkembangannya, seperti Max Weber, kemudian diikuti oleh tokoh-tokoh lain seperti Kenneth Boulding, Erich Fromm, dan Barbara Werd. Dalam perkembangan selanjutnya, kapitalisme juga dikritik oleh kaum pemimis, karena kapitalisme dianggap sangat berpihak kepada kepentingan laki-laki (patriarkhal). Hubungan antara nilai-nilai patriarkhal adalah ditunjukkan oleh Frederich Angels pada abad ke sembilan belas, ia menganggap bahwa tekanan terhadap wanita berakar pada sistem ekonomi kapitalis, tetapi ia juga mengakui bahwa sistem patriarkhal tersebut sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu, menurut estimasinya, bahwa sistem patriarkhal tersebut akan berakhir dengan runtuhnya kapitalisme.<sup>9</sup>

Kapitalisme masuk ke Indonesia pada saat penjajahan Belanda, tidak lama setelah kaum liberal di negeri Belanda memperoleh kemenangan di parlemen, kemudian disusul dengan diadakannya liberalisasi di Hindia Belanda (daerah jajahannya), terutama di Indonesia. Upaya-upaya tersebut antara lain berupa :

- 1) Penghapusan tanam paksa secara berangsur-angsur sejak tahun 1865 yang telah berlangsung mulai dari tahun 1830.
- 2) Diterimanya undang-undang agraria (hak atas tanah) pada tahun 1870. akibatnya:
  - a) Para kapitalis Belanda diperbolehkan menanam modalnya di Indonesia dengan menyewa tanah-tanah yang belum pernah ditanami oleh orang-orang Indonesia selama 75 tahun. Dengan demikian tinggallah perkebunan-perkebunan besar yang dibuka oleh para kapitalis Belanda.
  - b) Menjaga hak milik bangsa Indonesia, tanah Indonesia tidak boleh dijual kepada bangsa asing, dan hanya dapat dijual kepada bangsa Indonesia sendiri. Perubahan tanam paksa menjadi perusahaan perkebunan tanam paksa menjadi perkebunan perusahaan swasta, walaupun perubahan tersebut tidak membawa kepada perubahan nasib bangsa Indonesia, karena para kapitalis Belanda memaksa pekerja dengan upah yang serendah-rendahnya, yaitu 6 sen per hari.<sup>10</sup>

### **III. Pendidikan Liberal Kapitalistik**

Di antara ciri liberalisasi ilmu pengetahuan adalah:

- a. munculnya paham positivisme sekuler terhadap ilmu pengetahuan ilmiah, aktivitas teknologi, peradaban material, hukum, dan etika pragmatik individu.
- b. Ilmu pengetahuan ilmiah dibagi ke dalam disiplin yang spesialis, mendalam, teknis dan terpisah.

- c. Ilmu pengetahuan, positif mendeskreditkan atau mengeliminasi fungsi agama-agama dalam masyarakat ilmiah.<sup>11</sup>

Di Indonesia pendidikan liberal kapitalistik juga terjadi. Awalnya dimulai dari sekolah penjajah, dalam hal ini bangsa Belanda, tetapi penetrasi sekolah-sekolah liberal Hindia Belanda tersebut tidak dapat menghapuskan pendidikan Islam sama sekali, pesantren-pesantren di berbagai daerah masih berdiri tegak dan masih diminati oleh masyarakat Indonesia. Pemerintah Belanda bukan berarti tinggal diam dan membiarkan berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut, tetapi mereka telah berusaha sekuat tenaga untuk menghapusnya secara bertahap melalui intervensi terhadap sosio-ekonomi umat Islam. Pusat-pusat aktivitas-aktivitas perdagangan muslim pada daerah-daerah pesisir dirusak dan dibekukan, tetapi gangguan ekonomi yang dilakukan Belanda terhadap aset-aset umat Islam tidak menyurutkan tensi lembaga-lembaga pendidikan Islam, bahkan perkembangan lembaga-lembaga pendidikan Islam semakin meningkat sampai ke daerah-daerah pedalaman dan pelosok, tempat jaringan agraris dari para ulama berbasis pesantren dan tarekat sufi, terutama di Jawa yang telah mengambil alih peranan dalam pengajaran Islam.<sup>12</sup>

Belanda berusaha merusak pendidikan Islam dengan menyerang sistem perekonomiannya yang kuat, yaitu daerah-daerah pesisir dan pelabuhan yang merupakan penggerak roda utama perekonomian produktif umat Islam melalui jalan perdagangan, dengan harapan bahwa apabila ekonominya lemah otomatis, akan mempengaruhi dan melemahkan pendidikannya, inilah pikiran kapitalisme yang selalu memandang bahwa segala sesuatu akan berjalan bila didukung oleh kapital atau ekonomi yang mapan, tetapi pikiran tersebut tidak sepenuhnya benar bagi umat Islam, terutama yang hidup di zaman Belanda tersebut.

Setelah upaya penghancuran sendi-sendi ekonomi masyarakat muslim dirasakan kurang memadai untuk mencegah lajunya pendidikan berbasis Islam di Indonesia, pemerintah Hindia Belanda menggunakan power politik untuk menekannya dengan melalui pembuatan kebijakan atau aturan khusus bagi penyelenggaraan pendidikan Islam. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah:

- 1) pada tahun 1882, pemerintah Hindia Belanda membentuk suatu badan khusus yang bertugas mengawasi pendidikan dan pelaksanaan Islam di masyarakat. Dari laporan-laporan badan inilah sehingga pada tahun 1905 pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan bahwa setiap orang yang melakukan pengajaran atau pengajian agama Islam, harus terlebih dahulu melapor kepada pemerintah Belanda.
- 2) Pada tahun 1925, keluar lagi peraturan yang lebih ketat terhadap pendidikan agama Islam, yaitu tidak semua Kiyai boleh memberikan pelajaran agama Islam, kecuali telah mendapat rekomendasi dari pemerintah Belanda.
- 3) Pada tahun 1932, keluar lagi peraturan yang isinya adalah pemerintah Hindia Belanda berwenang untuk memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak memiliki izin atau memberikan pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginan Belanda.

Selain itu, pemerintah Belanda juga menempuh usaha yang mematikan kegiatan-kegiatan umat Islam, seperti mempelajari ikhwal pribumi dan agama Islam dengan ilmu khusus yang disebut *indologi* untuk mencari celah kelemahan Islam. Untuk itu diutuslah Cristian Snouck Hurgronje, sarjana sastra untuk belajar tentang Islam di Leiden dan Strasbourg, kemudian melanjutkan studinya ke Mekkah selama enam bulan, dan namanya diganti Abdul Gaffar. Setelah kembali dari Mekkah, ia dikirim untuk membantu menyelesaikan pemberontakan Santri di Aceh. Melalui kesempatan ini Snouck Hurgronje menyampaikan kepada pemerintah Hindia Belanda, agar mereka memperlihatkan sikap netral terhadap semua agama di Indonesia sambil menggunakan jalur pendidikan untuk mengatasi fanatisme Islam secara berevolusi, dan pemerintah Belanda diharapkan mewaspadaai masuknya Pan Islamisme yang sedang berkembang di Timur Tengah, dengan jalan menghalangi masuknya buku-buku atau brosur lain ke wilayah Indonesia, dan mengawasi kontak langsung dan tidak langsung antara tokoh-tokoh Islam Indonesia dengan tokoh-tokoh luar.<sup>13</sup>

Pada masa penjajahan Belanda sistem pendidikan liberal kapitalistik sulit untuk diterapkan kepada bangsa Indonesia, terutama pada sistem pendidikan Islam yang telah mengakar lebih dahulu dibandingkan dengan kedatangan bangsa penjajah Belanda tersebut. Kemudian orang-orang Belanda menarik simpatik masyarakat Indonesia, setiap kebijakan yang mereka buat selalu merugikan bangsa Indonesia, sehingga hal tersebut menjadi sumber kemarahan dan kebencian mereka terhadap pemerintah Belanda. Dengan demikian apau yang dilakukan dan diprogramkan oleh Belanda senantiasa dinilai negatif, termasuk sistem pendidikan yang mereka selenggarakan, baik yang dipertukarkan kepada orang-orang Belanda sendiri, maupun yang diperuntukkan kepada bangsa Indonesia. Nanti setelah kemerdekaan Indonesia, barulah mulai terbuka untuk mengadopsi sistem pendidikan Barat, termasuk melanjutkan sistem pendidikan yang telah ditinggalkan oleh penjajah Belanda, walaupun tidak secara total diambil. Bahkan lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan madrasah ikut mengalami pergeseran seiring dengan semakin gencarnya penetrasi modernisasi global.

Sejak pertengahan dekade 20-an, modernisasi pendidikan agama berlangsung demikian intens. Standarisasi sistem sekolah, pembakuan kurikulum, metode pembelajaran mengadopsi metode yang diterapkan oleh sekolah pemerintah, penerbitan buku-buku teks dilakukan oleh kaum modernis sendiri. Modernisasi pendidikan agama itu sesungguhnya sudah mewakili kecenderungan terhadap “sekularisasi”, salah satu indikatornya adalah mata-mata pelajaran umum (sekuler) terus-menerus membengkak dalam komposisi kurikulum lembaga pendidikan Islam.

Perubahan sistem pendidikan Islam itu, diikuti perubahan sistem ekonomi pendidikan dengan mengadopsi sistem kolonial Belanda yang kapitalis, sistem pendidikan agama lewat surau dan pondok pesantren yang memperoleh dana dari sedeqah yang diberikan oleh masyarakat, kini berubah menjadi madrasah yang harus dibayar oleh keluarga siswa masing-masing dengan bayaran yang sama tanpa mempertimbangkan tingkat ekonomi keluarga setiap siswa.<sup>14</sup>

Perubahan mendasar lain adalah menyangkut kepemilikan lembaga pendidikan, jika pesantren atau surau itu adalah dimiliki pendiri dan anak cucunya secara turun temurun, maka madrasah adalah milik organisasi, yayasan atau pemerintah yang sudah ditentukan sistem menejemennya.<sup>15</sup>

Madrasah atau sekolah yang dikelola oleh pemerintah dan yayasan sudah merupakan sistem pendidikan yang dikomersilkan, setiap siswa yang masuk di sekolah tersebut harus membayar uang sekolah, kemudian dananya dikelola oleh pihak penyelenggara sekolah, sebahagian dari dana tersebut dimanfaatkan untuk pemeliharaan lembaga, dan sebahagian yang lain digunakan untuk upah pengelola dan para guru.

Longgarnya persyaratan untuk mendirikan yayasan oleh pemerintah, menyebabkan menjamurnya lembaga-lembaga pendidikan swasta yang komersil, baik sekolah yang berhaluan umum, maupun madrasah dan pesantren modern, bahkan sampai kepada tingkat perguruan tinggi. Lembaga-lembaga pendidikan tersebut kadang-kadang terlihat sepi dalam hari-hari belajarnya tetapi setiap tahun mengeluarkan ijazah dalam jumlah yang banyak.

Kalau penyelenggara pendidikan swasta yang melakukan pungutan biaya sesuai dengan keinginan mereka dari para peserta didik, mungkin hal itu masih dapat dipandang wajar, karena lembaga itulah yang menjadi sumber dana primer untuk pembiayaan segala aspek yang menggerakkan roda pendidikannya, termasuk biaya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sekolah dan para guru. Tetapi kalau yang melakukannya adalah sekolah-sekolah di bawah naungan pemerintah, ini yang menjadi masalah yang serius. Dan hal ini menjadi kenyataan dalam dunia pendidikan di Indonesia dewasa ini, yaitu adanya kastanisasi pendidikan.

Kementrian Pendidikan Nasional telah memilah-milah sekolah menjadi Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), Rintisan SBI (RSBI), Sekolah Standar Nasional (SSN), dan Sekolah Reguler. Sebagai akibat diadakannya pemilahan sekolah-sekolah tersebut adalah lahirnya diskriminasi pendidikan bagi kelompok masyarakat miskin. Apabila stratifikasi pendidikan tersebut dikaitkan dengan masyarakat maka akan melahirkan kastanisasi pendidikan masyarakat sesuai dengan tingkat ekonominya. Kastanisasi pendidikan tersebut dapat diilustrasikan dalam empat tingkatan sebagai berikut: Kelompok A, SBI diisi oleh kumpulan anak-anak orang kaya dan pintar; Kelompok B, RSBI diisi oleh kumpulan anak-anak orang kaya tapi bodoh; Kelompok C, SSN, diisi oleh anak-anak pintar tapi miskin; dan Kelompok D, Sekolah Reguler, diisi oleh anak-anak yang tidak memiliki pilihan lain tetapi mereka mau sekolah juga.<sup>16</sup>

Untuk masuk di SBI dibutuhkan biaya pendaftaran antara enam sampai delapan juta rupiah, dengan biaya perbulannya antara empat ratus lima puluh ribu rupiah sampai lima ratus ribu rupiah. Dana tersebut mendapat tambahan berupa subsidi pemerintah selama tiga tahun antara enam ratus dua puluh juta sampai tujuh ratus dua puluh juta rupiah. Sebuah harga yang sangat fantastis yang menunjukkan adanya anak emas pemerintah terhadap lembaga-lembaga pendidikan milik negara.<sup>17</sup>

Eronisnya adalah kastanisasi pendidikan tersebut di atas, diisyaratkan oleh UU SISDIKNAS Nomor. 20 Tahun 2003, tentang Pengelolaan Pendidikan, Pasal 50 ayat 3,

yang berbunyi; Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.<sup>18</sup> Akibatnya adalah melahirkan pendidikan yang mahal dan eksklusif seperti penjelasan di atas.

Inilah yang menjadi bagian dari kegelisahan dunia pendidikan di Indonesia dewasa ini, karena pendidikan yang diharapkan menjadi agen dalam usaha untuk mencerdaskan seluruh bangsa Indonesia, tetapi terkontaminasi oleh praktek-praktek pendidikan kapitalis, sehingga pendidikan yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menemukan solusi terhadap berbagai persoalan-persoalan sosial bangsa, tetapi justru pendidikan itu sendiri yang sering menjadi persoalan sosial yang sulit ditemukan solusinya, seperti persoalan biayanya, lingkungannya, sarana-prasarananya, kurikulumnya, dan lain-lain.

Penomena-penomena pendidikan kapitalistik di atas telah mengaburkan visi dan misi pendidikan nasional yang telah disepakati, oleh karena itu sejak tahun sembilan puluhan, sistem penyelenggaraan pendidikan nasional sudah menuai kritikan dari seorang ahli pendidikan, yang bernama Syarief (1997) sebagaimana dikutip oleh Muhyi Batubara, ia mengatakan; bahwa perlu mempertahankan visi dan misi sistem pendidikan nasional dengan langkah-langkah strstegis sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas menejemen pendidikan.
- 2) Menciptakan kelembagaan agar daerah mempunyai peranan dan keterlibatan yang lebih besar dalam penyelenggaraan pendidikan.
- 3) Mendorong peran serta masyarakat termasuk lembaga sosial kemasyarakatan dan dunia usaha sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan dan penyelenggaraan pendidikan.
- 4) Menyediakan fasilitas yang memadai agar peserta didik dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, dinamis, kreatif dan produktif.
- 5) Menciptakan sistem pendidikan yang pro-aktif dan lentur (fleksibel).
- 6) Menciptkan suasana proses belajar mengajar yang mampu membangkitkan dan menumbuhkembangkan kretivitas dan inovasi serta minat dan semangat belajar.
- 7) Menanamkan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) sejak dini, mulai pada tingkat dasar dalam rangka menumbuhkembangkan budaya iptek.
- 8) Menumbuhkembangkan daya juang (*fighting spirit*), profesionalisme, dan wawasan keunggulan.
- 9) Menumbuhkembangkan sikap hidup yang hemat, cermat, teliti, tertib, tekun, dan disiplin.
- 10) Menumbuhkembangkan moral dan budipekerti luhur sebagai pengejawantahan dan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang maha esa.<sup>19</sup>

Dimensi pendidikan yang disebutkan di atas sangat ideal dan sangat positif, namun demikian dalam praktek penyelenggaraan pendidikan di lapangan kadang-kadang tidak mempertimbangkan demensi-dimensi tersebut, tetapi yang menjadi pemikiran utama adalah memperoleh keuntungan yang besar dari penyelenggaraan pendidikan tersebut, terutama dalam beberapa institusi pendidikan non pemerintah,

bahkan juga di beberapa institusi pendidikan milik pemerintah, terjadi praktek *cost* pendidikan yang tinggi, hal ini terlihat dalam hal perbedaan pembayaran sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP), khususnya di perguruan tinggi, antara satu institusi dengan institusi yang lain terjadi perbedaan nominal, seperti SPP mahasiswa antara UIN, UNM dan UNHAS di Sulawesi Selatan terdapat perbedaan yang mencolok, dan ironisnya, adalah kebijakan penetapan SPP tersebut merupakan keputusan masing-masing institusi tanpa ada ketentuan umum dari pemerintah. Apabila institusi pendidikan pemerintah sendiri bebas dalam menentukan jumlah nominal dana yang harus di tarik dari peserta didik melalui SPP dan jalur-jalur lainnya seperti biaya praktek, tentu institusi pendidikan non pemerintah dapat dengan sebebas-bebasnya menentukan jumlah nominal dana yang ditarik dari peserta didik sesuai keinginannya sendiri.

Dengan demikian, dunia pendidikan Indonesia dewasa ini dalam kenyataannya membangun kasta-kasta dalam sosial kemasyarakatan, karena hanyalah orang-orang kaya yang dapat mengecap pendidikan sesuai bakat dan minatnya, sementara orang-orang miskin, walaupun mereka berbakat dalam salah satu bidang ilmu pengetahuan tetapi karena tidak memiliki dana, maka mereka hanya bisa gigit jari saja, apa daya, dana tak sampai. Tetapi karena keinginan mereka yang besar terhadap ilmu pengetahuan, mereka rela memilih institusi yang murah dan terjangkau walaupun itu sangat jauh dari minat dan bakatnya. Dari sinilah biasanya lahir ungkapan, 'yang penting sekolah'.

Penjelasan di atas menggambarkan betapa tingginya praktek kapitalistik dalam dunia pendidikan di Indonesia. Dan yang lebih menyedihkan lagi ketika undang-undang badan hukum pendidikan digulirkan, dan bahkan sempat disahkan oleh anggota DPR RI, sehingga terdapat beberapa institusi pendidikan di pulau Jawa telah terlanjur menyatakan diri berbadan hukum seperti UI dan UGM, walaupun pada akhirnya undang-undang BHP tersebut dianulir kembali.

Lahirnya undang-undang BHP tersebut semakin memperkuat bahwa sistem pendidikan Indonesia adalah berbasis kapital.

Masalah pendidikan adalah ikhwil penting dan diprioritaskan oleh negara. Pendidikan dari negara adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah dan 'tak akan ada tanpa dukungannya. Sebaliknya, negara tak akan pernah bangkit apabila pendidikannya tak dibina dengan cemerlang. Salah satu fungsi pendidikan adalah untuk mengokohkan sistem negara yang ada. Kalau negaranya sekuler, sistem pendidikannya pastilah dirancang untuk mengokohkan sekularisme itu. Ironisnya, Indonesia, meski mayoritas penduduknya beragama Islam, memilih sistem negara yang sekuler. Jadilah kurikulum dibuat untuk mengokohkan sekularisme.<sup>20</sup>

Pada faktanya, kualitas pendidikan di Indonesia sangat menyedihkan, kualitas SDM Indonesia ternyata hanya menduduki peringkat 110 dari 179 negara di dunia (hasil survey UNDP 2002), pengangguran terus meningkat bahkan Badan Pusat Statistik menguraikan angka pengangguran lulusan universitas di Indonesia telah mencapai sekitar 385.000 orang pada tahun 2005. Pendidikan telah gagal mencetak anak didik

yang memiliki kepribadian yang khas, apalagi kepribadian Islam, sangat jauh. Kemampuan sains dan teknologi mereka juga menyedihkan. Padahal dua perkara ini merupakan perkara penting untuk membangun bangsa ini.

Otonomi kampus kemudian diwujudkan dengan diterapkannya empat perguruan tinggi negeri tertua di Indonesia, yaitu ITB, UI, UGM, dan IPB, yang kemudian diikuti oleh USU, UPI, dan terakhir UNAIR, menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara. Keempat perguruan tinggi pertama tersebut dijadikan percontohan penerapan otonomi perguruan tinggi. Ciri khas suatu PTBHMN adalah pengumpulan dan pengelolaan dana dilakukan secara mandiri oleh institusi pendidikan tersebut. Pemerintah lebih bertindak sebagai agen pemberi dana atau sebagai fasilitator asing. Di samping itu, pemerintah tidak berwenang untuk menunjuk rektor karena peran tersebut sudah diambil oleh Majelis Wali Amanat (WMA). Di bidang pendidikan ini, negara makin lepas tangan. Ini jelas ciri khas negara kapitalis; negara hanya jadi regulator.<sup>21</sup>

Alasannya, kelihatannya bagus seperti transparansi, akuntabilitas, dan jaminan mutu. Namun, pada praktiknya adalah kapitalisasi pendidikan. Cirinya, peran negara diminimalkan dan pendidikan lebih diserahkan kepada masyarakat. Lagi-lagi yang muncul adalah masalah pendanaan. Perguruan Tinggi akhirnya harus banting tulang untuk mencari sumber pendanaan mulai dari buka bisnis sampai yang paling gampang menaikkan biaya pendidikan. Hasilnya, pendidikan benar-benar komersialisasi.<sup>22</sup>

Sistem pendidikan yang ditegakkan berdasarkan ideologi sekularisme-kapitalisme atau sosialisme-komunisme berkeinginan mewujudkan struktur masyarakat sekuler-kapitalis atau sosialis-komunis. Sebaliknya, sistem pendidikan yang berbasis ideologi Islam berkehendak untuk membangun struktur masyarakat Islam yang tentu saja akan berbeda dengan dua sistem ideologi di atas.

Konsep pendidikan Barat adalah mengarahkan peserta didik untuk menjadi warga negara yang mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi sosial masyarakatnya, sehingga apapun yang menjadi ideologi dan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakatnya, peserta didik harus dididik untuk mendukung tuntutan dan harapan masyarakat tersebut. Dalam pandangan masyarakat komunis misalnya, bahwa warga negara yang baik adalah warga negara yang bersedia dijadikan sarana produksi, rela dijalankan oleh tangan para pemimpin partai yang berkuasa serta menghormati mereka layaknya sebagai Tuhan-Tuhan, para pemimpin partailah yang membentuk dan memola rakyat, mereka merupakan penentu mutlak arah kehidupan rakyat. Konsep ini berbeda dengan pandangan Islam, karena dalam Islam hal tersebut dianggap sebagai sebuah kebatilan.<sup>23</sup>

Tujuan pendidikan Islam adalah mengarahkan manusia menjadi masyarakat yang mampu mewujudkan penghambaan kepada Allah swt semata. Hal ini tergambar jelas dari firman Allah swt dalam Q.S. Az Zariyat (51) : 56

*“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahKu”.*

Melalui aplikasi penghambaan tersebut, terealisasi segala keutamaan kehidupan sosial, seperti kerja sama, tanggung jawab, saling menjamin, atau saling mencintai. Melalui pendidikan Islam, dalam diri anak akan berkembang keterikatan pada masyarakat kecenderungan untuk meneladani masyarakat, dan bangga sebagai umat Islam. Semuanya dikembangkan tanpa penyimpangan, degradasi, taklid buta, terhambatnya penyaluran bakat, atau hilangnya identitas dan sendi-sendi keperibadian. Dengan kata lain, pendidikan Islam mampu mewujudkan keseimbangan antara pendidikan individual dan pendidikan sosial, tanpa adanya tumpang tindih atau penyelewengan-penyelewengan.<sup>24</sup>

Hal ini senada dengan ungkapan Muhyi Batubara, bahwa pendidikan pada dasarnya merupakan usaha yang sangat mulia. Peranan strategis pendidikan itu sesungguhnya adalah memberikan kesempatan yang luas dan besar dalam upaya membentuk keperibadian dan pembinaan sumberdaya manusia, hanya saja lingkungan sosial budaya ternyata memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembinaan tersebut. Pendidikan pada sisi yang lain, ternyata mengakibatkan terjadinya ambivalen dalam membina keperibadian dan sumber daya manusia, artinya, pendidikan ternyata telah menciptakan target-target dalam pencapaiannya, sehingga dengan adanya target untuk mencapai sesuatu tersebut, ada dimensi yang terlupakan, yaitu pembentukan keperibadian peserta didik sebagai dasar dan pondasi pembinaan sumber daya manusia. Sifat ambivalen ini telah melahirkan sikap-sikap yang tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Terjadi akses negatif dari lingkungan yang begitu cepat menuntut suatu pencapaian, sementara nilai atau norma yang diharapkan dalam pembentukan keperibadian itu terabaikan.<sup>25</sup>

Bahkan proses pendidikan yang cepat dengan akselerasi yang akurat pun dengan tingkat presisi yang tinggi, ternyata tidak terantisipasi dalam pembentukan jati diri pribadi, selalu ditemukan gejala atau fenomena yang ternyata merusak pembentukan keperibadian sebagai bagian dari pembinaan sumber daya manusia. Pembangunan yang diinginkan melenceng.<sup>26</sup> Terutama, jika pendidikan itu diberdayakan hanya untuk meraut keuntungan materil semata.

Jadi ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam menghindari pendidikan nasional dari praktek kapitalisme, yaitu sistem pengelolaannya dan tujuannya. Pengelolaan pendidikan nasional harus bersifat terbuka, terjangkau, dan tidak diskriminatif. Sementara tujuan pendidikan, harus diarahkan kepada *mental oriented* peserta didik, bukan *social oriented*.

#### **IV. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, mengenai kapitalisme dan pendidikan kapitalistik, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kapitalisme muncul sebagai antitesa terhadap sekularisme dan materialisme, yang telah menjadi idologi masyarakat Barat pada saat itu. Sekularisme dan materialisme sendiri lahir dari emperisme dan individualisme. Sekularisme dan materialisme inilah menyebabkan tingginya produktifitas barang-barang dan kemewahan

duniawi, lalu kemudian melahirkan mentalitas abad industri yang manipulatif. Kebiasaan dan aktivitas baru itu mengakibatkan terciptanya institusi sosial dan politik baru dan membangkitkan pengajaran akademik baru yang membuat teori tentang seperangkat aktivitas ekonomi khusus, produksi, pertukaran, distribusi, peminjaman uang yang tiba-tiba muncul menonjol dalam *relief* yang tajam. Inilah yang mengakibatkan lahirnya kapitalisme. Kapitalisme tampil sebagai kelompok sosial-ekonomi yang bersandarkan kepada ajaran agama Katolik untuk melawan dan menetralkan paham sekularisme dan materialisme yang cenderung melepaskan diri dari ikatan agama. Dalam praktek etos kerja dan pemenuhan kebutuhan duniawi menurut paham kapitalisme dianggap sebagai bagian dari pengabdian terhadap Tuhan, bahkan dalam pandangannya, aktivitas duniawi dan imbalan dari aktivitas tersebut merupakan “takdir Ilahi”. Nilai-nilai religius ini mendasari energi emosional bagi kaum kapitalisme, dan faktor ini sangat penting bagi kemunculan dan perkembangan pesat kapitalisme.

2. Pada akhirnya, sistem kapitalisme ala puritanisme mengalami pergeseran menjadi sekuler. Kemudian mengalami perkembangan selanjutnya dengan terpecahnya menjadi dua kelompok yaitu; kapitalisme rasional dan kapitalisme irrasional. Kapitalisme rasional adalah kapitalisme yang mengembangkan metode-metode dan kuantitas produksi, kapitalisme bentuk pertama ini memproduksi materi atau kekayaan. Sementara kapitalisme irrasional adalah bentuk kapitalisme politik, yang dianggap mengeduk kekayaan materi yang sudah ada, dan bukannya ditanam sebagai usaha untuk menghasilkan peningkatan kekayaan
3. Sistem pendidikan yang berhaluan liberal kapitalistik adalah seluruh bentuk pengelolaan pendidikan yang dijadikan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan finansial belaka, yang tidak menghiraukan lagi pentingnya pendidikan bagi setiap anak. Sehingga sekolah-sekolah yang menolak seorang calon peserta didik karena tidak mampu membayar uang sekolah, maka sekolah-sekolah tersebut digolongkan sebagai sekolah kapitalis.

Endnotes:

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiolog: Suatu Pengantar*, (cet. XXXIV; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 171-172.

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 25

<sup>3</sup> Wahba Az-Zuhaili, al-Qur'an al-Karim: Binyatuhu al-Tasyri'iyyah wa Khashaisuhu, diterjemah oleh Syarif Hade Masyah dan Ali Efendi Anshori dengan judul *Al Qur'an Menjawab Tantangan Zaman*, (Cet. I; Jakarta Selatan: Mustaqim, 2002), h. 19.

<sup>4</sup> Pritjof capra, *The Turning Point* diterjemah oleh M. Toyibi dengan judul *Titik Balik Peradaban*, (Cet. V; Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2000), h. 263.

<sup>5</sup> Azim Nanji, *Peta Studi Islam: orientalisme dan Arah Baru Kajian Islam di Barat*, (Cet. I; Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003), h. 351 – 352.

<sup>6</sup> *Ibid*

- <sup>7</sup> Stanislav Andreski, *Max Weber on Capitalism, Bureaucracy, and Religion*, diterjemah oleh Hartono dengan judul *Max Weber: Kapitalisme, Birokrasi, dan Agama*, (cet. I; Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1989), h. 105 – 106.
- <sup>8</sup> Stanislav Andreski, *op cit.*, h. 9
- <sup>9</sup> Pritjop Capra, *op cit.*, h. 264
- <sup>10</sup> Redja Mudyahardjo, *Pengantar Pendidikan*, (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), h. 253 – 254.
- <sup>11</sup> Azim Nanji, *op cit.*, h. 360 – 361.
- <sup>12</sup> Yudi Latif, *Intelegensia Muslim dan Kuasa*, (Cet. I; Bandung: Mizan, 2005), h. 107.
- <sup>13</sup> Samsul Nizar (ed), *Sejarah Pendidikan Islam*, (Cet. I; Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009), h. 307 - 308
- <sup>14</sup> Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 144 – 145.
- <sup>15</sup> *Ibid.*, h. 146
- <sup>16</sup> Kastanisasi Pendidikan. “[Berita]. *Kompas*, No. 301, 7 Mei 2010, h. 33
- <sup>17</sup> *Ibid*
- <sup>18</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 Tentang *Pengelolaan Pendidikan*, (Cet. III; Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 38.
- <sup>19</sup> Muhyi Batubara, *Sosiologi Pendidikan*, (Cet. I; Jakarta: Ciputat Press, 2004), h. 81 – 82.
- <sup>20</sup> Jadwal Nasional: *Sistem Pendidikan Kapitalisme Sekuler vs Sistem Pendidikan Islam*, <http://jadwalnasional.com/2009/5>. (10 Mei 2010).
- <sup>21</sup> *Ibid*
- <sup>22</sup> *Ibid*
- <sup>23</sup> Abdurrahman An Nahlawi, *Ushul al-Tarbiyah al-Islamiah fi al-Bait, wa al-Madrasah wa al-Mujtama’*, diterjemah oleh Sahibuddin dengan judul *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat*, (Cet. II; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 129
- <sup>24</sup> *Ibid*
- <sup>25</sup> Muhyi Batubara, *op cit*, h. 78.
- <sup>26</sup> *Ibid*, h. 79.

## DAFTAR PUSTAKA

- An Nahlawi, Abdurrahman. *Ushul al-Tarbiyah al-Islamiah fi al-Bait, wa al-Madrasah wa al-Mujtama’*, diterjemah oleh Sahibuddin dengan judul *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat*. Cet. II; Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Andreski, Stanislav. *Max Weber on Capitalism, Bureaucracy, and Religion*, diterjemah oleh Hartono dengan judul *Max Weber: Kapitalisme, Birokrasi, dan Agama*. Cet. I; Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1989.
- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Az-Zuhaili, Wahba. *al-Qur’an al-Karim: Binyatuhu al-Tasyri’iyah wa Khashaisuhu*, diterjemah oleh Syarif Hade Masyah dan Ali Efendi Anshori dengan judul *Al Qur’an Menjawab Tantangan Zaman*. Cet. I; Jakarta Selatan: Mustaqim, 2002.
- Batubara, Muhyi. *Sosiologi Pendidikan*. Cet. I; Jakarta: Ciputat Press, 2004.
- Capra, Pritjof. *The Turning Point* diterjemah oleh M. Toyibi dengan judul *Titik Balik Peradaban*. Cet. V; Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2000.
- Kastanisasi Pendidikan. “[Berita]. *Kompas*, No. 301, 7 Mei 2010.

- 
- Latif, Yudi. *Intelegensia Muslim dan Kuasa*. Cet. I; Bandung: Mizan, 2005.
- Mudyahardjo, Redja. *Pengantar Pendidikan*. Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008.
- Nanji, Azim. *Peta Studi Islam: orientalisme dan Arah Baru Kajian Islam di Barat*. Cet. I; Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003.
- Nizar, Samsul (ed). *Sejarah Pendidikan Islam*. Cet. I; Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009.
- Republik Indonesia, “Undang-Undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 Tentang *Pengelolaan Pendidikan*. Cet. III; Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiolog: Suatu Pengantar*. Cet. XXXIV; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.